



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : **TATANG MUTTAQIN**
- Jabatan : **STAF AHLI BIDANG MANAJEMEN TALENTA**
- NHK : **713526**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.591.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/100 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 814.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.105.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 865.000.000		
4. Tanah Seluas 960 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 807.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	111.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH S Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	41.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	486.880.451
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.230.480.451
III. HUTANG	Rp.	82.993.983
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.147.486.468

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.